

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Rembang

## Jadi Bahasan BPK Sejak 2017, Piutang Pasar Sedan Belum Juga Dibayar

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/164629/jadi-bahasan-bpk-sejak-2017-piutang-pasar-sedan-belum-juga-dibayar>

**REMBANG, suaramerdeka.com** – Piutang kontribusi terhadap pengelolaan Pasar Sedan oleh pihak pengembang sebesar Rp 257.777.000, belum dibayarkan kepada Pemkab Rembang. Piutang tersebut merupakan tanggungan PT SJM, yang bertindak sebagai pengembang Pasar Sedan selama sekitar 7 tahun.

Sejatinya, piutang tersebut pernah menjadi bahasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2017. Dalam perkembangannya, tahun 2018 pihak pengembang disebut berjanji melakukan pembayaran piutang tersebut pada Desember 2018. Namun kenyataannya, sampai sekarang tunggakan retribusi itu belum terbayarkan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Fahrudin menyatakan, perkara itu sekarang dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Ketika itu, sebagai pengawas internal Inspektorat menjalankan perintah tindak lanjut atas BPK.

Namun, dalam perjalanannya ternyata perkara tersebut ditangani oleh pihak Kejari Rembang. Selanjutnya, oleh Kejari, Inspektorat diminta melakukan penghitungan atas kerugian negara atas pengelolaan Pasar Sedan.

“Setelah digelar, saya melakukan pemeriksaan. Saat pemanggilan pertama selaku penanggungjawab pengembang (PT SJM) tidak hadir. Panggilan kedua, kami diberi informasi penanggungjawab dari pengembang meninggal dunia. (tindak lanjutnya) silahkan tanya Kejari, saya tidak mau mendahului penyidik,” terang dia.

Menurut Fahrudin, meskipun sudah ada LHP BPK terjaik Pasar Sedan, namun sebagai bagian dari penanganan kasus, penghitungan kerugian negara harus dilakukan Inspektorat. Sebab, untuk kepentingan penanganan kasus, audit harus dilakukan secara menyeluruh.

Terkait dengan pengelolaan Pasar Sedan, ia memastikan saat ini sudah berada di tangan Pemkab Rembang melalui Dinperindagkop. Pengelolaan oleh Pemkab terhadap pasar itu sudah berlangsung sejak 2018.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Rembang, Bintarno saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum bisa memberikan keterangan. Ia beralasan sedang tidak mengantongi data perihal kasus tersebut.

Data yang didapat Suara Merdeka dari anggota Komisi B DPRD Rembang, pengembang Pasar Sedan menunggak kewajiban kontribusi masing-masing pada tahun 2011, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Bahkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017, pihak pengembang sama sekali tidak menyetorkan kontribusi.

(Ilyas al-Musthofa/CN19/SM Network)